

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nor Lyedya¹, M.Arsyad², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: norlyedya821@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada sekolah menengah pertama negeri 4 Amuntai. Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang diperoleh maka dapat dilihat fenomena permasalahan yaitu kurang dalam menjalankan program SSK sangat penting adanya dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya anggaran dana, kurangnya sosialisasi dan kurangnya koordinasi dari dinas terkait. Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kesadaran generasi muda, standar pelaksanaan optimal karena masih menyesuaikan kurikulum (2) standar pelaksanaan optimal karena masih menyesuaikan kurikulum (3) sasaran SSK optimal karena mengenalkan permasalahan kependudukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Program sekolah siaga kependudukan (SSK) pada sekolah menengah pertama negeri 4 amuntai kabupaten hulu sungai utara kurang optimal, dapat dilihat dari fenomena permasalahan yang masih kurang optimal. (2) faktor pendukung, tujuan dari SSK dirancang untuk membantu meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya memahami masalah kependudukan. (3) faktor penghambat, kurangnya anggaran dana tersedia dari pemerintah dinas yang menjalankan program tersebut. Untuk meningkatkan SSK disarankan kepada pihak terkait agar meningkatkan komunikasi kepada para pengelola SSK disekolah, kepada kepala sekolah menengah pertama negeri 4 amuntai diharapkan lebih meningkatkan lagi pemahaman untuk program SSK dan kepada tim verifikasi agar bisa terlebih dahulu mengkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan kegiatan acara sosialisasi dari dinas terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

A Population Alert School Program (SSK) at state junior high school 4 Amuntai. Based on the results of initial observations and the data obtained, it can be seen that the problem phenomenon is that the lack of implementation of the SSK program is very important in this research due to the lack of budget funds, lack of socialization and lack of coordination. This research aims to (1) increase awareness of the younger generation, optimal implementation standards because they are still adjusting the curriculum (2) optimal implementation standards because they are still adjusting the curriculum (3) optimal SSK targets because they introduce population problems. The results of the research show that (1) The implementation of the Population Alert School Program (SSK) in the 4 Amuntai State Junior High Schools in Hulu Sungai Utara Regency is less than optimal, this can be seen from the phenomenon of problems which are still less than optimal. (2) supporting factors, the aim of SSK is designed to help increase the awareness of the younger generation about the importance of understanding population problems. (3) inhibiting factor, lack of budget funds available from the government agency running the program. To improve SSK, the principal of the 4 Amuntai State Junior High School is expected to further increase understanding of the SSK program and to the verification team so that they can first coordinate with the school to carry out socialization activities from related agencies.

Keyword: Implementation of the Population Alert School (SSK) Program at State Junior High School 4 Amuntai, North Hulu Sungai Regency

PENDAHULUAN

Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga kependudukan ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Sujarweni, no date) .

Untuk mendukung terlaksananya program pendidikan kependudukan khususnya pendidikan formal melalui program Sekolah Siaga Kependudukan, perlu dibuat Pedoman Pengelolaan Sekolah Siaga Kependudukan. Pedoman diharapkan dapat dijadikan para pihak sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kependudukan di SMP, SMA dan sederajat guna mewujudkan tujuan program pendidikan kependudukan yakni, peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat, terutama generasi muda dalam partisipasi dan peran serta pada program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah kepadatan penduduk keempat terbanyak di dunia. “Mengutip data dari *The Spectator Index* terkait 20 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Indonesia berada diperingkat keempat dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 265 juta jiwa”. Hal ini sesuai dengan grafik proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik pada situs resminya yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 265.015.000. Permasalahan kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat akan pentingnya pengendalian jumlah penduduk menjadi faktor tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Permasalahan kepadatan penduduk harus ditangani dengan serius agar tidak menimbulkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. “Angka pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, yakni 1,49% , yang berarti tiap tahun pertambahan penduduk mencapai 3,5- 4 juta”. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah yang muncul akibat kepadatan penduduk yakni pengangguran, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, kebutuhan pangan dan air bersih yang meningkat, sampah yang semakin banyak serta berkurangnya lahan hijau.

Pentingnya Sekolah Siaga Kependudukan Tentu banyak orang yang bertanya ap aitu Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), meningat istilah itu masih baru dan sosialisasi tentang hal itu juga belum gencar. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan dan bukan merupakan mata pelajaran baru, sehingga tidak menambah jam kegiatan belajar mengajar. Tujuan dilaksanakannya program sekolah siaga kependudukan ini agar peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan ketrampilan tentang kepedulian kependudukan. Program sekolah siaga kependudukan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan. Program Sekolah Siaga Kependudukan merupakan wadah bagi program Pengendalian Penduduk, dan Pembangunan Keluarga yang juga menysasar generasi muda seperti program GenRe dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja sehingga dapat berjalan berdampingan dan saling bersinergi. Output dari program SSK yaitu pemahaman tentang kependudukan, baik kuantitas, kualitas persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga yang berkualitas serta

diharapkan dapat meminimalisir perkawinan usia anak. Pada pelaksanaannya program SSK tidak hanya mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran tetapi juga dilengkapi dengan adanya pojok kependudukan. Pojok kependudukan merupakan tempat yang menyediakan informasi mengenai kependudukan, seperti mading, poster, maupun buku yang berisi materi-materi kependudukan. Pojok kependudukan ini kemudian dikelola oleh siswa yang tergabung dalam kelompok pengurus. Sudah semestinya upaya dalam pengendalian penduduk juga menasar generasi muda, dengan begitu depannya dengan sebaik mungkin (Indriani Dini, 2023). Sebelum adanya program Sekolah Siaga Kependudukan yang pertama kali diresmikan pada tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun hasil observasi dilapangan, penulis menemukan masalah sebagai berikut :

1. Melihat serta mendengar langsung dari narasumber yang ada di lapangan terkait dengan adanya persoalan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang masih kurang dari segi anggaran dana, kurangnya fasilitas serta kurangnya tindak lanjut dari pihak Dinas yang terkait menyebabkan di sekolah yang mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan tersebut kurang perhatian dan tindakan dari pihak bersangkutan.
2. Kurangnya sosialisasi terhadap siswa tentang program Sekolah Siaga Kependudukan sehingga menyebabkan siswa kurang memahami bagaimana program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tersebut.
3. Kurangnya koordinasi dari pihak penanggung jawab kepada sekolah yang terkait (Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai) mengenai program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sehingga program ini berjalan tanpa ada pengawasan dari pihak penanggung jawab yang menjalankan program sekolah siaga kependudukan tersebut.

Program yang berjalan dengan cukup optimal sehingga diharuskan agar program saat ini bisa mencapai keberhasilan lebih maksimal lagi. Dari uraian diatas yang terkait dengan program sekolah siaga kependudukan (SSK), maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran program ini berupa untuk membantu meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya memahami masalah kependudukan bwlum berjalan dengan baik. Mengenai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan-permasalahan dalam proses berjalannya program SSK yang diberikan oleh pemerintah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menelitian pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif da hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai yang berada di jalan Sukmaraga, Kelurahan Sungai Malang, Kode Pos 71418, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif,, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang diteliti. Ada berbagai metode yang dapat digunakan, metode yang akan dipilih peneliti harus sesuai dan berhubungan dengan prosedur Implementasi Sosialisasi Sekolah Siaga kependudukan (SKK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metode pengumpulan dan menggudakan meotode teknik: wawancara mendalam dilakukan dengan cara Purposive Sampling (pengambilan sampel secara sengaja) dengan para informan, observasi lapangan berlangsung, dokumentasi berupa foto-foto penelitian dalam kegiatan penelitian saat dilapangan. Teknik analisis data dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah kurang optimal. Adapun aspek yang optimal yaitu: **Pertama**, Pada indikator tujuan dari pelaksanaan karena untuk membantu meningkatkan kesadaran generasi muda. **Kedua**, Standar dari pelaksanaan SSK karena menyesuaikan kurikulum yang ada. **Ketiga**, pada indikator sasaran dari SSK karena sasaran utama untuk siswa cukup tepat. **Keempat**, pada indikator cakupan tugas karena sudah menyiapkan terutama untuk pojok baca, sarana dan prasarana. **Kelima**, pada indikator respon implementor terhadap kebijakan karena responnya cukup baik. Adapun aspek yang kurang optimal yaitu: **Pertama**, pada indikator anggaran kurang optimal untuk program SSK karena masih ada kurangnya dana anggaran. **Kedua**, pada indikator sumber daya manusia kurang optimal karena sebagian besar belum mengetahui SSK. **Ketiga**, pada indikator karakter pelaksana kurang optimal dalam pelaksanaan karena karakteristinya sangat bermacam-macam. **Keempat**, pada indikator komunikasi antar pelaksana kurang optimal karena masih ada beberapa yang perlu di rencanakan. **Kelima**, pada indikator koordinasi antar isntansi kurang optimal karena belum terlaksana dengan baik. **Keenam**, Lingkungan sosial kurang optimal karena masih ada yang mempunyai sifat pemalu. **Ketujuh**, Lingkungan ekonomi kurang optimal karena masih ada kekurangan dalam segi ekonominya. **Kedelapan**, Elite politik dari kantor DPPKB dan Dinas Pendidikan kurang optimal karena mengunjungi dan menanyakan permasalahan apa saja yang ada sekolah ini perlu tidak membiarkan sekolah berjalan tanpa adanya pendamping.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:
Pertama, Faktor penghambat adalah faktor kurangnya pemahaman dari guru yang kurang inovasi sehingga anak-anak kurang juga dalam mengetahui program SSK ini. **Kedua**, kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengelolaan kebijakan SSK disekolah mengakibatkan para pengelola tidak bisa berbuat apa-apa terhadap SSK yang sudah tepat sasaran tetapi kurang dari komunikasi dan koordinasinya. **Ketiga**, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terkait yaitu Dinas DPPKB dan Dinas Pendidikan yang mengakibatkan penyaluran kurang anggaran, komunikasi dan koordinasi untuk program SSK. **Keempat**, Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh tim-tim verivikasi kepada pengelola kebijakan SSK di sekolah mengakibatkan para pengelola tidak berbisa berbuat apa-apa terhadap data penerima SSK yang sudah menjadi sasaran.

Adapun faktor yang mendukung Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pihak SMP karena jika tidak ada dukungan dari sekolah tersebut program SSK tidak akan terlaksana.

Melalui analisis dengan teori Donal Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino, 2022:150-152(Agustino, 2016), maka faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi:

1. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat berjalannya program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- a. Anggaran Dana
- b. Koordinasi
- c. Elite Politik

2. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung berjalannya program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- a. Tujuan
- b. Karakteristik
- c. Respon Implementor

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menangani tentang masalah Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) agar lebih meningkatkan komunikasi kepada para pengelola program sekolah siaga kependudukan di sekolah supaya berjalan dengan lancar serta tepat sasaran dalam penentuan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
2. Kepada Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar lebih meningkatkan pemahaman kepada siswa/i bagaimana pelaksanaan program sekolah siaga kependudukan (SSK) bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu guru harus meningkatkan pemahaman siswa/i di Sekolah Menengah Negeri 4 Amuntai masih kurang memahami apa yang sudah dilaksanakan program SSK disekolah tersebut.
3. Kepada tim verifikasi penentuan program SSK agar melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah mengenai penentuan acara apa saja yang perlu disiapkan untuk acara sosialisasi dari dinas pusat terkait. Selain itu diharapkan lebih teliti lagi dalam penentuan anggaran dana yang diperlukan pihak sekolah supaya program yang saat ini dijalannya tidak terbengkalai dan berjalan dengan sendirinya sehingga pihak sekolah bingung sendiri tanpa ada dampingan dari pihak verifikasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Indriani Dini (2023) *Sekolah Siaga Kpendudukan*. Jakarta.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Sujarweni, V.W. (no date) *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI



TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.